

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana tertulis di dalam rumusan masalah mengenai peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Pengkajian Sosial (YLPS) Humana dalam menggulangi meningkatnya jumlah anak jalanan dari eksploitasi ekonomi di Yogyakarta, maka mendasarkan pada hasil penelitian, wawancara dan pembahasan, disimpulkan bahwa YLPS Humana merupakan LSM yang berorientasi pada penanganan anak jalanan. Fokus utamanya adalah upaya untuk memaksimalkan akses layanan publik bagi sasaran terhadap pemenuhan hak-hak anak pada khususnya dan pemberdayaan masyarakat pada umumnya. YLPS Humana juga berperan dalam mengurangi jam kerja anak turun ke jalan yang kontribusinya dilakukan melalui berbagai jenis pelayanan yakni : pelayanan pendidikan, kesehatan dan advokasi. Dengan diberikanya berbagai pelayanan oleh YLPS Humana nyatanya mampu mengurangi jumlah anak jalanan di Yogyakarta sehingga dapat mewujudkan tujuan pemerintah dalam mengentaskan permasalahan sosial mengenai anak jalanan yang menjadi fenomena di dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. Saran**

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, di akhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya membantu dan dapat berguna bagi semua pihak yakni :

1. Dari segi pemerintahan, agar pemerintah mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang anak jalanan dan segala aspek kehidupannya yang meliputi hak-hak dan kewajiban anak jalanan sebagai Warga Negara Indonesia.
2. Pihak Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana harus mengusahakan tempat tetap yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan untuk menghindari terjadinya penggusuran tempat yang dapat berdampak pada terhentinya aktifitas pelayanan.
3. Pihak Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana perlu merekrut beberapa relawan lagi agar dapat fokus dalam menangani anak jalanan beserta permasalahannya serta lebih bervariasi dalam memberikan kegiatan pelayanannya.
4. Pembuat Peraturan daerah harus memahami penalaran hukum secara teliti dalam hal perumusan sanksi Peraturan Daerah agar tidak bertentangan/ melanggar peraturan di atasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dellyana, Shanty. 1988. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Jakarta: Liberty.
- Joni, Muhammad. 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1985. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : P.N Balai Pustaka.
- Siregar, Bismar. 1986. *Hukum Dan Anak-Anak*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soekamto, Soejono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press.
- Tim Penyusun Kamus. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Trisnadi, Wiwied. 2008. *Anak Jalanan Di Indonesia*, Yogyakarta : YLPS Humana.

### Artikel

- Sumiarni, Endang M.G, 2002, *Perlindungan Anak Jalanan dari Aspek Hukum Positif di Indonesia*, *Justitia Et Pax*, hlm.48, Vol.22 No.1, Juni 2002.

### Website

- <http://surat.vivanews.com/news/read/184014-eksploitasi-anak-di-bawah-umur-tak-dibenarkan>, 30 Agustus, 2010, 23:00.
- <http://reisthya.blogspot.com/2010/03/solusi-untuk-tindak-eksploitasi-anak.html>, Smart Education, Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak, 22 agustus 2011, 22:05.
- <http://regional.kompas.com/read/2011/04/11/2116056/800.Anak.Jalanan.Berkeliaran.di.DIY>, Pepih Nugraha | Senin, 11 April 2011 | 21:16 WIB.

<http://odishalahuddin.wordpress.com/2010/01/04/anak-jalanan-studi-kasus-atas-persoalan-sosial/>, Odi Shalahuddin, Anak Jalanan, 4 September 2011, 12:30.

<http://webcache.googleusercontent.com/arisandi.com.kode+etik+lembaga+swadaya+masyarakat>, 27 September 2011, 18:44.

<http://docs.google.com/viewer?Yayasan.pdf+uu+no+16+tahun+2000.id>, 11 September 2011, 13:00.

<http://muliadinur.wordpress.com/2008/08/08/pengkajian-hukum-empiris/>, 05 September 2011, 22: 05.

<http://www.ylpshumana.or.id/>, 07 September 2011, 22:15.

<http://KamusBahasaIndonesia.org/penanggulangan>, 07 September 2011, 19:00

[http:// wikipedia.org/wiki/anak\\_jalanan](http://wikipedia.org/wiki/anak_jalanan), 09 September 2011, 08:00.

[http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asse/indonesia/Indon\\_Child\\_Prot.htm](http://www.law.yale.edu/rcw/rcw/jurisdictions/asse/indonesia/Indon_Child_Prot.htm), 05 September 2011, 01 :17.

Bibble dan Thomas dalam <http://arisandi.com/?p=584>, February 7th, 2011, 10:25.

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 10 september 2011, 11:07.

Soejono Soekamto dalam <http://organisasi.org/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat.id>, 05 September 2011, 12:00.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2179552-faktor-yang-mempengaruhi-anak-jalanan/>, 05 September 2011, 21:09.

<http://gudeg.net/id/news/2009/12/5062/Jumlah-Anak-Jalanan-Meningkat-Tiap-Tahun.html>, 05 September 2011, 22: 29.

<https://odishalahuddin.wordpress.com/perda+yogyakarta+tentang+perlindungan+anak+yang+hidup+di+jalan>, 06 september 2011, 08:00.

<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 11 september 2011, 15:31.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan.

**SURAT KETERANGAN**

**No : 047/KET/YLPSH/IX/II**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christina Hera Parwati  
Jabatan : Direktur  
Nama Lembaga : YLPS Humana  
Alamat Lembaga : Kampung Nandan Rt. 01 Rw. 38 No. 4 A, Jl. Monjali Km. 6,  
Tepi Barat Karitas, Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Clara Setyowati  
NIM : 08 05 09 893  
Nama Universitas : Universitas Atmajaya, Fakultas Hukum, Program Kekhususan  
Hukum Ekonomi dan Bisnis  
Judul Penelitian : Peran LSM YLPS Humana dalam Menanggulangi Meningkatnya  
Anak Jalanan dari Eksploitasi Ekonomi di Yogyakarta

Telah menyelesaikan penelitiannya di lembaga kami.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2011

  
**Christina Hera Parwati**  
Direktur

## PROFIL ORGANISASI



onesia  
ia  
esia

### >> Latar Belakang :

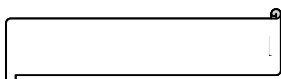
GirLi pada awal kemunculannya adalah satu kelompok mahasiswa yang mendukung anak jalanan (khususnya laki-laki) yang berumur antara 9 - 18 tahun di Yogyakarta. Nama GirLi diambil dari tempat tinggal mereka yang terletak di tepi sungai (pingGir kaLi) Code, di tengah kota Yogyakarta. Sejak tahun 1982, kelompok anak jalanan pertama di Indonesia ini sudah mulai memikirkan kebutuhan anak-anak jalanan secara informal. Kelompok ini juga aktif berkegiatan dalam rangka bertahan hidup sambil berusaha mengkampanyekan hak-hak anak.

Formalisasi kelompok tersebut dilakukan pada tanggal 13 Juni 1990, dengan dibentuknya Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) HUMANA, akta notaris no. 6, dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor 76/90/VI/Y. Mandat Lembaga ini adalah untuk merancang study mengenai kehidupan keseharian anak-anak jalanan, membangun program-program yang mendasar melalui penelitian untuk kemudian mengimplementasikannya secara praxis. Hal ini diawali pada tahun 1993, saat Humana memperoleh dukungan keuangan dari Terre des Hommes Germany untuk pelaksanaan program-programnya.

Sejak tahun 1991. Humana fokus pada aktivitasnya dalam mengatasi permasalahan anak jalanan melalui pendekatan kuratif yaitu reunifikasi kepada keluarga dan integrasi dengan masyarakat. Hampir sebagian besar anak jalanan pada masa ini dating dari luar Jogjakarta. Mereka hidup di jalan tanpa ada pendampingan keluarga sama sekali.

Krisis ekonomi yang melanda negeri ini pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam fenomena kemiskinan di Indonesia. Didasari oleh identifikasi dan riset yang dilakukan Humana, sesudah krisis ekonomi sejumlah kampung di Yogyakarta mulai menunjukkan gejala peningkatan jumlah anak jalanan. Fenomena ini tidak teridentifikasi pada masa sebelum krisis terjadi. Pasca krisis, anak jalanan di Yogyakarta bukannya didominasi oleh anak-anak tanpa keluarga, melainkan anak-anak yang masih memiliki keluarga yang tinggal di sekitar ruang publik tempat mereka mencari nafkah. Ditandai dengan masuknya Asian Development Bank (ADB) yang mulai merespon pasca krisis ekonomi, jumlah LSM yang bergerak di bidang anak jalanan juga mulai meningkat secara tajam. Di Yogyakarta, diperkirakan ada 10 LSM yang tiba-tiba muncul dan bersaing untuk mendapatkan penerima manfaat program mereka. Sasaran penerima manfaat adalah anak-anak tanpa keluarga. Belum ada LSM yang bekerja untuk menangani anak jalanan yang berasal dari kampung.

Menginjak tahun 2002, Humana mulai fokus pada penanganan anak jalanan yang berasal dari kampung di sekitar wilayah Yogyakarta. Fokus utama kegiatan Humana adalah kegiatan PENCEGAHAN. Saat ini Humana sudah melakukan pendampingan terhadap lima kampung di



Yogyakarta. Dalam aktivitas ini, Humana memilih akses dalam pendidikan dan kesehatan sebagai pintu masuk karena dua hal ini merupakan kebutuhan utama para anak-anak marjinal

>> Visi :

Mengupayakan keberdayaan dan pemenuhan hak anak

>> Misi :

Empowering riset dan pembangunan database tentang anak

Melakukan pendidikan alternatif untuk anak

Pemenuhan hak anak

Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak

>> Divisi :

Divisi Pelayanan langsung, meliputi: Pendidikan dan Kesehatan

Divisi Kajian/Advokasi

Pelayanan langsung :

Aktivitas ini dilakukan dalam rangka merespon ketidakterpenuhan hak anak yang berada di area kerja program ini. Selain itu, Aktivitas pelayanan langsung dimaksudkan sekaligus untuk mengumpulkan data kasus, memantau perkembangan hak anak secara umum dan sebagai pintu masuk untuk program Advokasi. Bidang yang menjadi fokus aktivitas pelayanan langsung adalah Pendidikan dan Kesehatan. Adapun Bentuk bentuk aktivitas yang akan dijalankan adalah:

#### 1. Layanan Pendidikan

##### a Pendidikan Formal dan In Formal

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah kembali ke sekolah dan/atau untuk meminimalisir kemungkinan anak putus sekolah. Target sasaran kegiatan ini adalah anak-anak usia wajib belajar. Adapun bentuk aktivitas yang disediakan adalah :

(1) Bantuan masuk SD. Meskipun Wajib Belajar 9 tahun sudah dicanangkan beberapa tahun yang lalu tetapi fakta dilapangan menunjukkan masih banyak anak usia sekolah dasar yang belum dapat mengenyam pendidikan. Dengan adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah), meskipun sudah membebaskan dari biaya SPP setiap bulannya, tetapi pengeluaran terbesar keluarga untuk dapat menyekolahkan anaknya adalah untuk biaya sehari-hari seperti biaya transportasi, pembelian buku/alat peraga, uang saku.

(2) Bantuan Masuk SMP, Kegiatan ini dipilih karena beberapa hal, diantaranya: akses terhadap layanan beasiswa biasanya tidak diberikan kepada anak-anak yang hendak melanjutkan ke jenjang SMP. Padahal, biaya pendidikan untuk jenjang ini cukup besar. Di samping itu, berdasarkan temuan di lapangan kerentanan anak putus sekolah pada jenjang ini cukup tinggi.

(3) Mulai Oktober 2011 bekerjasama dengan sebuah PKBM di Yogyakarta, YLPS Humana mulai merintis pendidikan di luar sekolah yaitu kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaring anak-anak yang terpaksa harus Drop Out/ tidak menyelesaikan jenjang pendidikannya baik ketika di SD, SMP maupun SMA, agar mereka dapat memperoleh ijazah setara pendidikan SD, SMP dan SMA. Hal ini akan memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

(4).Tutorial, kegiatan ini bertujuan untuk membantu anak menguasai mata pelajaran di sekolah. Anak -anak rentan yang masih bersekolah mengalami kesulitan dalam mengikuti mata pelajaran karena waktu belajarnya disita untuk kegiatan ekonomi sementara orang tua tidak bisa membantu karena kesibukan survival.

##### b. Pendidikan Non Formal/ vocational



Tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi anak drop-out dari sekolah dan anak jalanan dengan ketrampilan sesuai minat dan kebutuhan anak sehingga mereka bisa memiliki skill untuk bekerja.

c. Pendidikan Alternatif melalui berbagai media

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan anak kompetensi gagasan, kompetensi teknis dan kompetensi organisasi agar anak dapat menyuarakan haknya dan berperan dalam dinamika masyarakat. Kegiatan ini melibatkan anak jalanan maupun anak kampung, dengan rentang usia antara 12 - 18 tahun.

Kegiatan ini secara umum menggunakan metode partisipasi riset action (PRA). Di sini anak-anak akan difasilitasi melalui serangkaian Focus Group Discussion (FGD), mulai dari identifikasi masalah, merencanakan kegiatan, sampai pada pelaksanaan dan evaluasi program. . Anak-anak akan diperkenalkan dengan alat-alat analisis sederhana seperti peta sosial, diagram ven dan juga alat perencanaan seperti pohon masalah, serta alat evaluasi. Metode ini dikembangkan melalui media artistik (musik dll), media visual (film, gambar, foto), dan siaran radio.

## 2. Layanan Kesehatan

Bentuk-bentuk layanan kesehatan meliputi:

a. Pelayanan dan Pemeriksaan Kesehatan untuk anak dan komunitas. Kegiatan ini dilakukan dalam dua bentuk kegiatan yakni mobile klinik dan rujukan. Mobile klinik adalah kegiatan pelayanan dan pemeriksaan kesehatan secara berkala yang diadakan langsung di lokasi kelompok sasaran. Diharapkan dengan kegiatan ini masalah-masalah kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat akan terdeteksi dan terantisipasi sedini mungkin. Khusus untuk komunitas jalanan, mobile klinik juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi penularan HIV/Aids yang mulai marak di komunitas ini. Tetapi sejak tahun 2009, mobile klinik dihentikan. Humana mulai mendidik masyarakat untuk dapat mengakses fasilitas kesehatan public agar tiap keluarga mempunyai kartu jaminan (Jamkesmas, Jamkesda, Jamkesos). Rujukan ke Rumah Sakit dilakukan sesuai kebutuhan, terutama untuk kasus-kasus di mana layanan asuransi kesehatan dari pemerintah (Jamkessos) belum bisa diakses secara optimal.

b. Promosi kesehatan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pendidikan kesehatan bagi anak-anak dan sosialisasi tentang akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Pendidikan kesehatan difokuskan pada persoalan kesehatan sehari-hari, budaya hidup sehat dan kesehatan lingkungan. Selain itu juga akan memasukan materi tentang penularan HIV/Aids serta seluk-beluk tindakan medis dan pendampingan terhadap ODHA

c. Sosialisasi akses layanan kesehatan untuk masyarakat dilakukan melalui berbagai media komunikasi (cetak dan elektronik) serta workshop-workshop yang dilakukan secara berkala yang melibatkan masyarakat dampingan dan instansi terkait.

## 3. Advokasi

Advokasi yang dimaksud adalah upaya untuk mengaktifkan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya terhadap rakyat, khususnya anak-anak, melalui penyediaan layanan publik yang memadai

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat seluruhnya sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara jasmani rohani, dan sosial;
- b. bahwa sebagai akibat kondisi perkembangan sosial di masyarakat menyebabkan sebagian anak-anak terpaksa hidup di jalan
- c. bahwa untuk mencegah dan menarik anak dari kehidupan di jalan perlu dilakukan melalui perlindungan dan pemenuhan hak anak yang hidup di jalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK YANG HIDUP DI JALAN

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 43

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa anak untuk melakukan aktifitas ekonomi dan/atau kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (3) Setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau ditempat umum kepada anak yang hidup di jalan.

#### Pasal 44

(1) Setiap orang dilarang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Tindakan menghalangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

1. menolak mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi;
2. menolak melakukan tindakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh orang tersebut.

### BAB X

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 46

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

#### Pasal 47

Setiap orang yang menghalangi anak yang hidup di jalan yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).